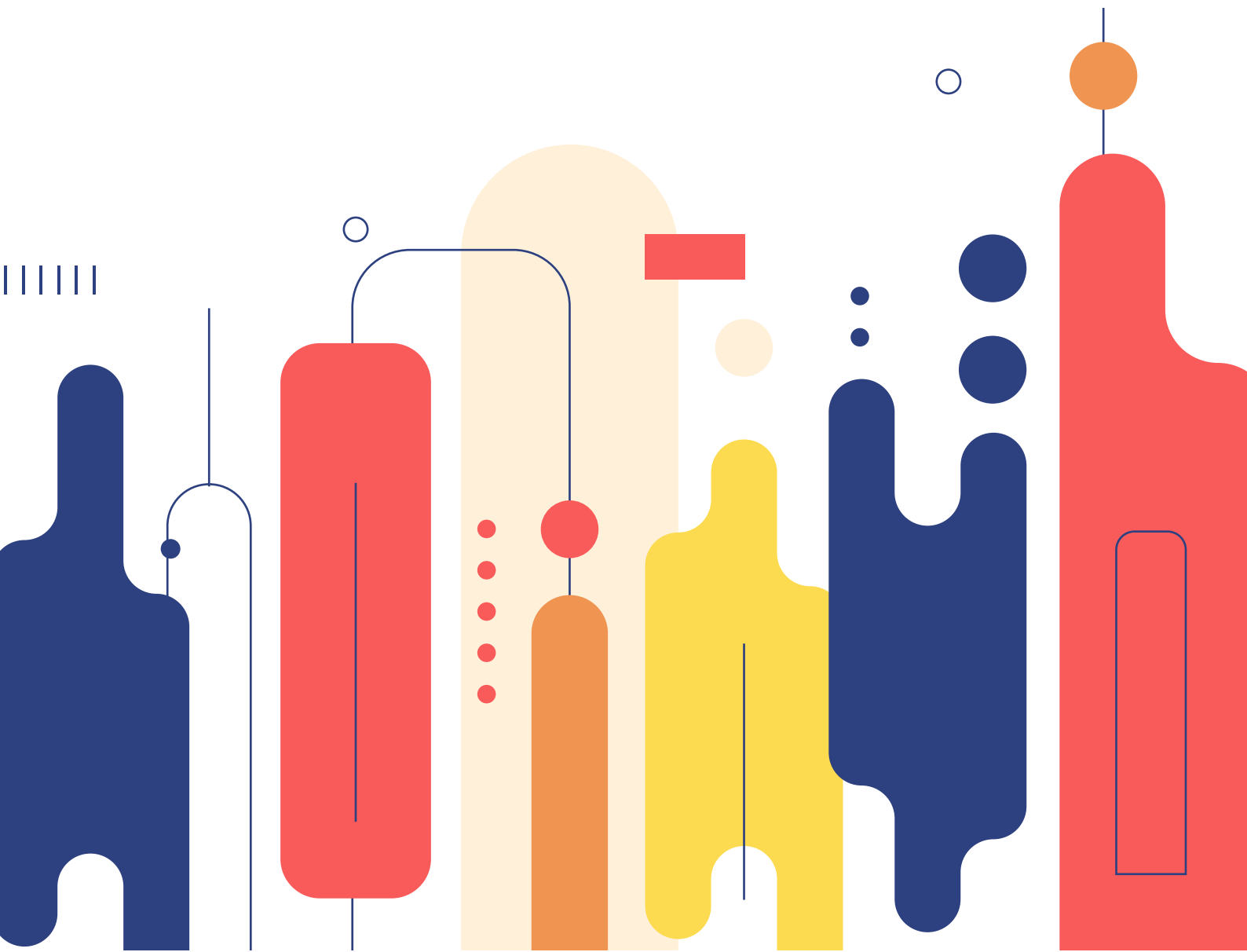


BPR Gita

PT. BPR GITAMAKMUR UTAMA

Member of 
Hagalink

LAPORAN TATA KELOLA 2023



Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT BPR Gita Makmur Utama

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665278-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600093-26012024115829

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

nismatanjung02@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 11:58:29



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

No. GMU/A/012/0124
Lampiran : 1 (satu) set

29 Januari 2024

Kepada Yth.
Perbarindo
Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia
Di tempat

Perihal : Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gitamakmur Utama Tahun 2022

Dengan hormat,
Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gitamakmur Utama posisi 31 Desember 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Risniwati
Direktur Utama



Lisa Andriani
Direktur

DAFTAR ISI

I.	Tanda Bukti Kirim Aplikasi Apolo Online OJK – Laporan Tata Kelola Tahun 2022	1 Hal
II.	Form A.00.00 Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR.....	1 Hal
III.	Form A.01.10 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	1 Hal
IV.	Form A.01.20 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	2 Hal
V.	Form A.01.31 Tugas dan Tanggung Jawab Komite	1 Hal
VI.	Form A.01.32 Struktur,Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite ...	1 Hal
VII.	Form A.01.33 Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	1 Hal
VIII.	Form A.02.10 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	1 Hal
IX.	Form A.02.20 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	1 Hal
X.	Form A.03.10 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	1 Hal
XI.	Form A.03.20 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	1 Hal
XII.	Form A.04.10 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	1 Hal
XIII.	Form A.04.20 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	1 Hal
XIV.	Form A.05.10 Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	1 Hal
XV.	Form A.05.20 Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	1 Hal
XVI.	Form A.06.10 Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	1 Hal
XVII.	Form A.06.20 Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS	1 Hal
XVIII.	Form A.07.00 Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	1 Hal
XIX.	Form A.08.10 Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun	1 Hal
XX.	Form A.08.20 Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	1 Hal
XXI.	Form A.09.00 Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	1 Hal
XXII.	Form A.10.00 Permasalahan Hukum yang Dihadapi	1 Hal
XXIII.	Form A.11.00 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	1 Hal
XXIV.	Form A.12.00 Pemberian Dana Untuk Kegiatan sosial dan Kegiatan Politik	1 Hal
XXV.	Form B.00.00 Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola BPR	1 Hal
XXVI.	Form B.00.01 Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola	3 Hal
XXVII.	Form B.01.00 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6 Hal
XXVIII.	Form B.02.00 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6 Hal
XXIX.	Form B.03.00 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)	4 Hal
XXX.	Form B.04.00 Penanganan Benturan Kepentingan	4 Hal
XXXI.	Form B.05.00 Penerapan Fungsi Kepatuhan	6 Hal
XXXII.	Form B.06.00 Penerapan Fungsi Audit Intern	6 Hal
XXXIII.	Form B.07.00 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Audit Eksternal)	4 Hal
XXXIV.	Form B.08.00 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	6 Hal

XXXV.	Form B.09.00 Batas Maksimum Pemberian Kredit	4 Hal
XXXVI.	Form B.10.00 Rencana Bisnis BPR	4 Hal
XXXVII.	Form B.11.00 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	4 Hal
XXXVIII.	Lembar Persetujuan & Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Gitamakmur Utama	1 Hal
XXXIX.	Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola	1 Hal

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda N0.123 Ciputat . Tangerang Selatan 15412

Nomor Telepon : 021 7491763

Penjelasan Umum : Kegiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis dengan selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan yang kuat untuk menjawab perubahan lingkungan bisnis, persaingan usaha yang semakin kompetitif, sehingga kepercayaan dan keyakinan seluruh nasabah serta para pemangku kepentingan dapat terpelihara dan meningkat. Tata kelola perusahaan yang ideal juga harus didukung dengan berbagai unsur - unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh karyawan bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern, dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan dalam mendukung terciptanya infrastruktur usaha yang kokoh. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. BPR sebagai fungsi perantara antara pihak yang menyimpan dana dan pihak yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan operasional BPR. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance (GCG).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Risniwati	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas kepengurusan BPR.2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang undangan yang berlaku.3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dewan komisaris.4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 5.Senantiasa menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. 6. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 7.Melakukan pengawasan aktif terkait pelaksanaan APUPPT dan PPPSPM. 8. Menetapkan Kebijakan dan prosedur proram APUPPT dan PPPSPM. 9 Menetapkan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko dan Tata Kelola. 10.Memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai.
2	Lisa Andriani	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gita telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, otoritas lainnya dan peraturan perundangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau peraturan perundang-undangan.2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gita tidak menyimpang dari Peraturan OJK dan peraturan perundang undangan. 3.Memantau dan menjaga Kepatuhan BPR Gita terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada OJK atau instansi lainnya. 4.Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. 5. Melaporan kepada Direksi Utama dan komisaris secara tertulis terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan BPR Gita. 6.Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama, namun selama ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan Direktur Utama. 7.Melakukan Pengawasan aktif terkait Program APUPPT dan PPPSPM. 8. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur terkait program APUPPD dan PPPSPM. 9. Menetapkan Kebijakan Pedoman Manajemen Risiko dan tata Kelola. 10. Membuat rekomendasi perpanjangan dan pencairan kredit

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang telah dilakukan tahun 2022 antara lain: 1. Rencana pengembangan Kantor Kas Pasar Pagi pada bulan Mei 2022 sudah menjadi Kantor cabang. 2. Sehubungan dengan debitur restrukturisasi sudah dilakukan penagihan, hanya sisa 4 debitur yang belum lancar (Safitri, KSN, Tjiu Siu Hiong, Gunawan) dan hanya terdapat 1 tambahan debitur masuk restruk yaitu a/n. Henny Iman Santoso karena kondisi usaha agak menurun sehingga debitur minta dilakukan restruk. Untuk debitur yang ada sudah intensif dilakukan pemantauan. Untuk 1 debitur macet akan dilakukan jalur lelang untuk penyelesaian pemberian kompensasi (pada bulan Jan 2023) akan dilakukan proses lelang agunan. 3. Meningkatkan aktivitas marketing untuk mengejar pertumbuhan kredit dengan pendekatan secara intensif atau menerapkan program customer get customer. 4. Menjaga kemampuan likuiditas BPR setiap harinya di CR 6%. 5. Mengangkat PE Audit untuk mengisi kekosongan posisi PE audit sejak tahun 2021, telah dilakukan di Bulan Juni 2022. 6. Mengangkat 2 Pimpinan Cabang pada bulan Agustus 2022.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Kartika Dewi	Komisaris Utama	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris : 1. memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi. 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur Inti, Debitur terkait dan debitur bermasalah. 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APUPPT dan PPPSPM. 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 6. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit inten BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 8. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 9. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan. 10. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.
2	Soesilo Basoeki	Komisaris	Tugas dan tanggung jawab Komisaris : 1. memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberi nasihat kepada direksi. 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai debitur inti, debitur terkait dan debitur bermasalah. 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APUPPT dan PPPSPM. 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 6. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko. 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit inten BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 8. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan : 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan. 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 9. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan. 10. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi Dewan Komisaris Kepada Direksi : 1. Rencana pengembangan Kantor Kas, untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah BPR. 2. Sehubungan dengan debitur restrukturisasi komisaris memberikan arahan direksi agar senantiasa aktif untuk melakukan penagihan-penagihan. Untuk debitur yang ada dilakukan monitoring agar dapat mendeteksi lebih awal apabila terjadi penurunan usaha yang berdampak pada pembayaran kewajiban debitur. Khusus untuk debitur macet sebaiknya segera diputuskan besarnya jumlah kompensasi, agar proses serah terima agunan dapat segera di selesaikan. 3. Meningkatkan aktivitas marketing untuk mengejar pertumbuhan kredit dengan pendekatan secara intensif atau menerapkan program customer get customer. 4. Menjaga kemampuan likuiditas BPR berarti menjaga kepercayaan kepada nasabah. Dilakukan pemantauan kebutuhan likuiditas setiap saat. 5. Mengangkat PE Audit untuk mengisi kekosongan posisi PE audit. 6. Mengangkat 2 Pimpinan Cabang.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Risniwati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lisa Andriani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Risniwati	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lisa Andriani	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kartika Dewi	720.000.000	6,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ibu Kartika Dewi memiliki saham BPR GitamakmurUtama sebesar 6 persen dari total saham, senilai 720.000.000 rupiah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kartika Dewi	BPR Gamon	6,00
2	Kartika Dewi	BPR Pantura	6,00
3	Kartika Dewi	Haga Bangun Bersama	6,00
4	Kartika Dewi	Bangun Latih Cendekia	20,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kartika Dewi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Soesilo Basoeki	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Kartika Dewi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Soesilo Basoeki	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	65080021	2	31698612
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	0	22657833	0	19999876
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		87737854		51698488

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK/KOM/001/0723, tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk Gaji Komisaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. SK/PSP/001/0723, tanggal 21 Juli 2023 yang ditandatangani oleh PSP. Sedangkan untuk Remunerasi ditetapkan berdasarkan SK/KOM/002/0923 tanggal 11 september 2022 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak	Tidak
2	Transportasi	Ya Kendaraan Oprasional	Tidak
3	Asuransi Kesehatan	Ya Asuransi Kesehatan	Tidak
4	Fasilitas lainnya	Tidak	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,41	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,52	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,38	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji tertinggi terdapat pada salah satu pemimpin cabang dan gaji terendah pada salah satu Security.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	26-01-2023	6	Perkembangan NPL 31 Desember 2022
2	23-01-2023	8	Realisasi RBB dan pencapaian Kinerja BPR Kuartal IV tahun 2022
3	16-03-2023	8	Laporan hasil pemeriksaan surprised audit pada kantor cabang Tanjung Duren
4	13-04-2023	9	Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR Gitamakmur Utama Kuartal I
5	25-05-2023	9	Perkembangan NPL 30 April 2023
6	13-07-2023	9	Realisasi RBB dan Pencapaian Kinerja BPR Gitamakmur Utama Kuartal II
7	20-07-2023	4	Notaris, Progress Core banking, Kalender
8	10-08-2023	8	Laporan Target dan pencapaian rencana kerja semester I
9	19-08-2023	8	Perkembangan NPL 31 Juli 2023
10	12-10-2023	8	Realisasi RBB Kuartal III tahun 2023
11	26-10-2023	8	Laporan Implementasi Kepatuhan September 2023
12	03-11-2023	8	Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Kartika Dewi	0	12	100,00
2	Soesilo Basoeki	0	12	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	PT Haga Bangun Bersama	0	Risniwati	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor	125	Nilai sewa sebanding dengan nilai sewa bangunan sejenis di areanya
2	PT Haga Bangun Bersama	0	Risniwati	Direktur Utama	Sewa Mobil Kantor	60	Pemilik merupakan anak dari pemegang saham

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT BPR Gita Makmur Utama
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Ir. H. Juanda N0.123 Ciputat . Tangerang Selatan 15412
Nomor Telepon	: 021 7491763
Modal Inti BPR	: 16.586.606.533,00
Total Aset BPR	: 188.769.447.146,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,4
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan hasil penilaian penilaian penerapan Tata Kelola, BPR Gitamakmur Utama nilai kompositnya 1,363 dengan peringkat komposit Sangat Baik. Hal itu tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas penerapan 11 faktor penilaian dalam penerapan tata kelola sebagai berikut : 1.Susunan Direksi , telah memenuhi ketentuan OJK. 2. Susunan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK. 3. Struktur organisasi BPR Gitamakmur Utama telah memenuhi ketentuan Struktur Organisasi dalam penerapan Tata kelola, PE Audit Internal sudah ada. 4.BPR telah memiliki ketentuan tentang pengaturan benturan kepentingan. 5.Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama. 6. PE Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal. 7. Penunjukan KAP sudah sesuai dengan prosedur, atas persetujuan dewan komisaris melalui RUPS. 8. BPR Telah menunjuk PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT. 9.BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). 10. Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 11.BPR telah menyediakan system pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,50	0,12	1,12	0.224	Susunan Direksi BPR Gitamakmur Utama telah memenuhi ketentuan OJK, yaitu terdiri dari dua orang direksi, salah satunya membawahkan fungsi kepatuhan. Domisili di kabupaten/kotamadya yang sama atau berbatasan langsung dengan lokasi BPR. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan dewan komisaris, tidak memiliki penasehat perorangan, telah lulus uji kemampuan dan diangkat dalam RUPS.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,55	0,20	1,36	0.204	Susunan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan OJK, tidak melebihi jumlah anggota direksi, telah lulus uji kompetensi dan kepatuhan serta diangkat dalam RUPS. Bertempat tinggal di provinsi yang sama atau berbatasan langsung dengan lokasi BPR
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT BPR Gitamakmur Utama telah memenuhi ketentuan struktur organisasi dalam penerapan Tata kelola, yaitu dengan mengangkat PE Kepatuhan pada bulan November 2021. PE Audit Juni 2022 dan Pimpinan Cabang pada bulan Agustus 2022
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,80	0,20	1,50	0.150	BPR sudah memiliki kebijakan , system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan. Tetapi sampai saat ini blm ada benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,64	0,20	1,44	0.144	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan: tidak merangkap sebagai direktur utama, tidak merangkap bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana, mampu bekerja secara independent, memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,70	0,13	1,53	0.153	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern telah memiliki dan melakukan pengkajian pedoman kerja system dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,40	0,20	1,60	0.040	Penunjukan KAP sudah sesuai dengan prosedur dan atas persetujuan Dewan Komisaris melalui RUPS. Penugasan kepada KAP telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional KAP. KAP harus terdaftar di OJK dan BPR wajib melaporkan Management Letter kepada OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,80	0,20	1,84	0.184	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas Manajemen Risiko. BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	BPR telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan debitur besar.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,40	0,10	1,50	0.113	BPR telah menyediakan system pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat.
Nilai Komposit						1.4	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, modal dibawah Rp 50 M, ada dua anggota Direksi. Direktur Utama : Risniwati, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan : Lisa Andriani
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, seluruh anggota direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama atau berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR. Tempat tinggal Direktur Utama di daerah Jakarta Barat, masih berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Sedangkan Direktur Kepatuhan bertempat tinggal di Pamulang, satu provinsi dengan lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi di BPR Gitamakmur Utama tidak ada yang merangkap jabatan di bank, perusahaan non bank atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak memiliki penasihat perorangan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa pengalihan tugas tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan menerima masukan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK. Tetapi masih kurang 1 point terkait analisa ulang debitur Safitri karena debitur belum memberikan dokumen yang diminta dan waktu untuk di visit ke lokasi usaha.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi memberikan laporan manajemen setiap bulan kepada dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Telah dilakukan Rapat Direksi dan sejauh ini belum ada perbedaan pendapat. Selama Tahun 2023 Rapat Direksi telah dilakukan sebanyak 9 kali, dari bulan Januari hingga Desember 2023
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan keluarga
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Setiap tahun Direksi mengadakan program training yang berkesinambungan. Adapun training yang telah diadakan selama tahun 2023 antara lain : Penyusunan Laporan Tahunan Audit, Building Customer Engagement, Outing dan Team Building, Analisa Kredit UMKM, Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pasca Pandemi Covid, APU PPT, Kualitas KAP dan PPAP, Lelang Agunan dll
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi telah mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugasnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Sudah ada SK yang mengatur tata tertib direksi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi BPR Gitamakmur Utama telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS yang diadakan setiap tahun.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi sudah melakukan diskusi kepada pemimpin kantor mengenai strategi dan langkah- yang akan di lakukan/action plan untukmeningkatkan pertumbuhan BPR, dan akan melakukan review setiap bulannya perbaikan-perbaikan yang akan di lakukan BPR.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Telah dilakukan Rapat Direksi, dan di buat kan notulen dan sejauh ini belum ada perbedaan pendapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Program training yang telah diadakan telah berdampak positif terhadap kompetensi karyawan. Dengan diadakannya training karyawan semakin memahami pekerjaannya, kemampuannya meningkat, pengetahuannya bertambah.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPR, atau majalah, media BPR (dalam hal ini website BPR) sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,12	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Jumlah anggota Dewan Komisaris dua orang, komisaris utama adalah Ibu Kartika Dewi, sedangkan komisaris adalah Bapak Soesilo Basoeki.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan. Jumlah anggota komisaris dua orang, Direksi dua orang. Jumlah anggota dewan komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor pusat BPR. Ibu Kartika Dewi bertempat tinggal di Jakarta Utara, Bapak Soesilo Basoeki bertempat tinggal di Cimanggis, Depok
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Sudah ada SK yang mengatur tata tertib kerja Dewan Komisaris, antain lain SK tentang job description Komisaris, agenda dan jadwal rapat rutin dewan komisaris, ketentuan dan kebijakan remunerasi bagi anggota dewan komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari dua BPR atau BPRS lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, seluruh komisaris independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, dan atau pemegang saham pengendali.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris setiap bulan rutin melaksanakan rapat dengan Direksi, dari hasil diskusi dibuatkan notulen dengan arahan, nasetah dan rekomendasi yang harus dilakukan Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan komisaris saat rapat dengan Direksi selalu memberikan pengarahan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategi yang telah di jalankan BM kantor dan dituangkan dalam notulen rapat
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris mengawasi Direksi terhadap tindak lanjut hasil audit intern dan extern, serta menyampaikan hasil tidak lanjut kepada pengawas.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris sudah melakukan Rapat Dewan Komisaris. Untuk tahun 2023, Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 12 kali.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Telah dilakukan rapat Dewan Komisaris, tetapi selama ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	BPR Telah memenuhi ketentuan, dimana Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi/keluarga atau pihak lain yang dapat merugikan BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan yang tertuang dalam notulen rapat.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Sudah ada notulen rapat DewanKkomisaris dan sejauh ini belum ada perbedaan pendapat
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR sudah memiliki prosedur tentang benturan kepentingan. Ketentuan ini dituangkan dalam SE GCG No. 11/01/-0/21, tanggal 15 Februari 2021 tentang Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Terdapat benturan kepentingan tetapi tidak berpengaruh pada kegiatan utama BPR. Hanya menyangkut logistik, sewa gedung dan sewa kendaraan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan terkait sewa gedung dan kendaraan kantor
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR telah memenuhi ketentuan, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah memenuhi ketentuan, telah diangkat PE kepatuhan pada bulan November 2021
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR telah memiliki job description PE Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Sosialisasi juga dilakukan ke kantor cabang.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu mengawasi kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Telah memenuhi ketentuan, PE Kepatuhan berusaha memantau kepatuhan BPR terhadap peraturan yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR lalu di diskusikan bersama kepada direktur kepatuhan, agar kebijakan yang di review sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,64	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	BPR belum pernah melanggar ketentuan.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melapor kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan , menyampaikan laporan khusus melapor kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sudah ada Pejabat Eksekutif Audit Internal yang diangkat sejak Juni 2022.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Sudah ada pedoman Audit Intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE Audit Intern independen terhadap satuan kerja operasional
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	BPR Telah memenuhi Ketentuan, dimana Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR memiliki program pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi Audit intern. Tetapi belum memiliki program rekrutmen untuk audit interen. Rekrutmen berdasarkan pengalaman kerja
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR akan melakukan menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	0
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dilakukan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit Intern. Dalam tahun 2023 ini, PE Audit intern telah mengikuti training antara lain : penyusunan laporan tahunan audit BPR, Building Customer Engagement dan Team Building
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE Audit Intern akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan menyampaikan laporan kepada Direkur Utama dan Komisaris dengan tembusan ke Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Telah memenuhi Ketentuan, dengan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)</p>	2	0
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Intern.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, penunjukan Kantor Akuntan Publik di BPR merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, dan telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, yaitu melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, cakupan hasil audit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR Gitamakmur Utama modal intinya kurang dari 50 M, BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR belum memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. Selama ini belum ada produk dan aktivitas baru di BPR
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	BPR telah memenuhi ketentuan, memiliki kebijakan matrix kewenangan

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, Dewan Komisaris ikut mereview dan menandatangani SE yang terkait dengan Manajemen Risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko. Selain itu Dewan Komisaris juga mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, diantaranya penunjukan KAP, kebijakan APU PPT, kebijakan Manajemen Risiko, Penerapan Tata Kelola, Laporan Hasil Audit, Teknologi Informasi
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, yaitu dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, yaitu telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, yaitu BPR telah memiliki sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah memenuhi ketentuan, yaitu dengan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Selama ini belum ada aktivitas baru yang dilakukan di BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR mengeluarkan Surat Keputusan Direksi dalam pemberian kredit kepada pihak terkait. Pemantauan BMPK juga dilakukan setiap bulan. Tidak ada pelampauan/ pelanggaran BMPK. Kebijakan terkait BMPK tertuang dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR yang terbaru tanggal 27 November 2023
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR telah mengupdate kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang undangan
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, tidak ada pelampauan/ pelanggaran BMPK kepada pihak terkait/ tidak terkait/ kelompok peminjam
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dengan tidak melanggar atau melampaui BMPK dalam pemberian Kredit kepada Pihak ketiga

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana Direksi menyusun Rencana Bisnis BPR dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana RBB yang disusun menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana Rencana Bisnis BPR yang disusun didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan : a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan c.penerapan manajemen risiko
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dimana Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, Rencana Bisnis termasuk perubahannya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online via Apollo
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memenuhi ketentuan dengan adanya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan dengan menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan keuangan, opini akuntan publik.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dengan melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Misalnya dengan menyampaikan Laporan Bulanan, SLIK, OBOX dan laporan lainnya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah memenuhi ketentuan, dengan membuat laporan Publikasi yang ditanda tangani oleh paling sedikit 1 anggota direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dipublikasikan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah saat ini nihil. Tetapi tetap dipantau dan dibuat setiap bulan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gita Makmur Utama

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:
Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Gitamakmur Utama Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020

Demikian Laporan ini dibuat, untuk menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola BPR Gitamakmur Utama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja Perusahaan, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tangerang Selatan , 22 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Risniwati
Direktur Utama



Kartika Dewi
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Gitamakmur Utama
Alamat : Jl. Ir. H . Juanda 123 Ciputat Tangerang Selatan Banten
No Telp : 021-7491763
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : 16,586,606,533,-
Total Aset : 188,769,447,146,-
Status Audit : 1
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.363
Peringkat Komposit : Sangat Baik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian penerapan Tata Kelola, BPR Gitamakmur Utama nilai kompositnya 1,363 dengan peringkat komposit Sangat Baik.
Hal itu tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas penerapan 11 faktor penilaian dalam penerapan tata kelola sebagai berikut :

1. Susunan Direksi, telah memenuhi ketentuan OJK.
2. Susunan Dewan Komsaris telah sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Struktur organisasi BPR Gitamakmur Utama telah memenuhi ketentuan Struktur Organisasi dalam penerapan Tata kelola, hanya ada kekurangan PE Audit Internal , dimana pada bulan Des 2021 sudah ada PE Audit Internal yang akan joint 5 Januari 2022, namun ybs meninggal dunia mendadak pada Des 21.
4. BPR telah memiliki ketentuan tentang pengaturan benturan kepentingan.
5. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak merangkap sebagai Direktur Utama.
6. PE Audit bertanggung jawab atas pelaksanaan audit internal.
7. Penunjukan KAP sudah sesuai dengan prosedur, atas persetujuan dewan komisaris melalui RUPS.
8. BPR Telah menunjuk PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT.
9. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedut tertulis terkait Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).
10. Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. 1

1. BPR telah menyediakan system pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Tangerang Selatan, 26 Januari 2024

Risniwati
Direktur Utama

Kartika Dewi
Komisaris Utama

